



# Laporan ringkas pelaksanaan Program Review

Yayasan Tifa

## **A. Latar Belakang**

Mekanisme dan proses Evaluasi dalam sistem pembangunan nasional di Indonesia belum memperoleh perhatian dengan porsi yang seimbang sebagaimana mekanisme dan proses perencanaan dalam sistem pembangunan, khususnya terkait dengan pelibatan masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan saat ini memang telah dikenal berbagai mekanisme evaluasi dan pelaporan pembangunan seperti Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), LaKIP, SAKIP, pelaporan LPPD, LKPJ, dan RLPPD yang mestinya memuat berbagai capaian pelaksanaan program-program pemerintah, namun sebagian besar dari mekanisme tersebut masih bersifat sangat teknokratik. Berbeda dengan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan secara partisipatif dan sistematis, proses evaluasi pembangunan yang partisipatif masih jarang dilakukan, atau pelaksanaannya sangat bergantung pada political will dari pemangku kepentingan.

Mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terfokus pada aspek teknokratis administratif berpotensi melahirkan sejumlah persoalan dalam pembangunan. Tanpa metode pengawasan dan evaluasi yang baik dan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, pendekatan-pendekatan teknokratik justru melahirkan masalah seperti: pelaksanaan program yang menjadi rutinitas tanpa melihat aspek urgensi dan kebutuhan masyarakat karena pemerintah enggan berinovasi dan mengambil risiko (risk aversion), pelaksanaan program atau bukti transaksi fiktif hanya untuk menggugurkan kewajiban administratif, pelaksanaan program yang tidak efisien yang mengakibatkan pemborosan anggaran, hingga potensi penyalahgunaan anggaran secara tidak sah. Berangkat dari pemikiran di atas, pada tahun 2020 Yayasan Tifa dan Japan Initiative dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Pemerintah Jepang, berinisiatif untuk memperkenalkan Program Review, metode evaluasi program pembangunan yang telah dilaksanakan di Jepang sebagai salah satu referensi untuk memperkaya wacana mekanisme evaluasi pembangunan di Indonesia.

## **B. Kerangka Proyek**

Pemerintah Jepang telah mengimplementasikan Program Review (sebelumnya dikenal sebagai Sortir Program) sejak tahun 2002 dan mulai diadopsi secara nasional pada 2010 saat pemerintahan Kabinet Hatoyama – Kabinet Noda. Tujuan dari pelaksanaan Program Review di Jepang bukan hanya untuk menemukan inefisiensi dari pelaksanaan program, tetapi juga untuk melakukan peninjauan kembali program-program pemerintah berdasarkan informasi-informasi dan fakta di lapangan. Pelaksanaan Program Review di Jepang ini dikaitkan dengan proses reformasi birokrasi di Jepang. Sebagai contoh pelaksanaan Program Review di Jepang tahun 2013, dari 4,727 program yang direview, 1,966 program diantaranya mengalami revisi, 119 program dihentikan, 875 program dihentikan secara bertahap dan dikurangi serta 972 program mengalami perbaikan dalam pelaksanaannya mengikuti rekomendasi dari Program Review. Secara total, jumlah anggaran yang bisa dihemat adalah 280 B Yen (kurang lebih setara dengan 2,8 B USD). Melalui Program Review, Pemerintah Jepang tidak hanya berhasil menghemat anggaran, tetapi juga banyak melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembangunan, memprioritaskan atau menyeleksi kelompok sasaran, memperketat evaluasi, serta pengukuran hasil program.

Meskipun Program Review di Jepang telah sukses memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Jepang, Yayasan Tifa dan Japan Initiative sepenuhnya menyadari bahwa Indonesia dan Jepang memiliki konteks struktur pemerintahan, sosial, politik serta hubungan antar pemerintah yang berbeda. Metode Program Review yang telah diterapkan di Jepang belum tentu bisa sepenuhnya diadopsi untuk dilaksanakan di Indonesia, sehingga perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia

sebelum diimplementasikan. Tujuan dari pelaksanaan program yang sekarang dijalankan Yayasan Tifa bersama dengan Japan Initiative adalah untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan metode Program Review di kalangan aparat pemerintah Indonesia, Organisasi Non Pemerintah dan masyarakat luas di Indonesia. Target program pada tahun 2020 difokuskan untuk memperkenalkan pendekatan Program Review yang selama ini dikenal di Jepang serta kontekstualisasi dan mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan apabila Program Review akan diadaptasi ke dalam konteks sistem pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Yayasan Tifa bersama Japan Initiative merencanakan untuk melakukan uji coba (piloting) implementasi Program Review di Indonesia secara tentative apabila dukungan dari Kementerian Luar Negeri Pemerintah Jepang masih tetap berlanjut.

### **C. Pelaksanaan Proyek**

Situasi pandemic Covid-19 memaksa pengelola proyek untuk melaksanakan seluruh kegiatan secara daring/online.

#### **1. FGD dengan CSO lokal maupun nasional**

Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan melibatkan pelaku pengorganisasian masyarakat dan expert pada isu pembangunan. FGD dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh berbagai penilaian atas metode dan pendekatan evaluasi yang selama ini digunakan oleh pemerintah dari kacamata masyarakat sipil. Secara lebih detail kegiatan dilakukan untuk:

- a. Mengidentifikasi pentingnya evaluasi dalam tahapan pembangunan.
- b. Mengidentifikasi praktik-praktik evaluasi yang diinisiasi oleh pemerintah baik dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional dari kacamata CSO/masyarakat sipil.
- c. Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan di berbagai level pemerintah dari pengalaman CSO/masyarakat sipil.
- d. Mengidentifikasi inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh organisasi non pemerintah/CSO dalam menjalankan evaluasi program pembangunan terutama yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari CSO antara lain: (1) Indonesia Budget Center – Jakarta; (2) Indonesia Corruption Watch – Jakarta; (3) IDEA – Yogyakarta; (4) PATTIRO – Jakarta; (5) FITRA – Jakarta; (6) Institute for Research and Empowerment – Sleman; (7) Donders – Sumba; (8) KOPEL – South Sulawesi.

#### **2. FGD dengan pemerintah desa**

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020 secara daring. Pada diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah desa dan sejumlah pelaku pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. FGD ini ditujukan untuk menggali informasi terkait praktik-praktik evaluasi pembangunan di tingkat desa sebagai unit pemerintah yang paling kecil sekaligus paling dekat dan memiliki interaksi secara langsung dengan masyarakat.

- a. Untuk mengidentifikasi praktik-praktik evaluasi pembangunan di tingkat desa.
- b. Untuk mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan di tingkat desa.
- c. Untuk mengidentifikasi inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan evaluasi pembangunan yang belum diatur dalam regulasi nasional/amanat pemerintah yang lebih tinggi.

FGD ini penting bagi pelaksanaan proyek terutama dikarenakan Yayasan Tifa dan Japan Initiative berencana untuk mengujicobakan Program Review di tingkat desa.

Hadir dalam kegiatan FGD antara lain perwakilan dari desa: (1) Labanan, Kalimantan Timur; (2) Nita, Nusa Tenggara Timur; (3) Sriharjo, D.I. Yogyakarta; (4) Sempu, Kediri, East Java; (5) Gondangsari, Magelang, Jawa Tengah; (6) Paninggaran, Pekalongan, Jawa tengah; (7) Darim, Indramayu, West Java.

### **3. FGD dengan perwakilan pemerintah kabupaten**

Rangkaian FGD ditutup dengan FGD dengan perwakilan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada 10 September 2020. Pada FGD ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait praktik-praktik pelaksanaan evaluasi pembangunan di tingkat pemerintah daerah, termasuk tantangan, inovasi yang dilakukan, dan pengintegrasian ke dalam mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dalam FGD ini juga dilakukan triangulasi informasi dan data yang diperoleh dari FGD yang dilakukan dengan pemerintah desa dan CSO.

### **4. Penulisan buku**

Produksi buku Program Review berdasarkan pengalaman Jepang sekaligus masukan yang diperoleh selama pelaksanaan rangkaian FGD menjadi salah satu target utama dari pelaksanaan proyek ini. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, pengalaman pengimplementasian Program Review di Jepang tentu tidak bisa serta merta diadopsi di Indonesia yang memiliki berbagai karakteristik yang berbeda. Oleh karenanya, selama masa penulisan buku, banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai konteks dan target pembaca di Indonesia.

Penulisan buku dimulai pada bulan Juli 2020 dengan proses penerjemahan materi dari bahasa Jepang ke Indonesia. Hasil terjemahan ini kemudian juga turut digunakan sebagai materi dan bahan penyusunan pertanyaan untuk proses FGD. Demikian pula, hasil FGD kemudian digunakan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam proses pengumpulan dan penerjemahan materi yang bersumber dari bahasa Jepang. Proses selanjutnya adalah penulisan kembali naskah terjemahan dengan penyesuaian yang lebih mendalam dan editing bahasa.

### **5. Pembuatan video pengenalan Program Review**

Mengingat Program Review merupakan metode yang baru dan sebelumnya dilakukan pada konteks yang berbeda dengan Indonesia, maka dibutuhkan media pengenalan yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Maka, Yayasan Tifa membuat video animasi singkat pengenalan Program Review. Video ini akan ditayangkan dalam acara webinar pengenalan Program Review sekaligus menjadi materi ajar dalam kegiatan sosialisasi Program review lebih lanjut.

### **6. Koordinasi dengan Open Government Indonesia (OGI) untuk Rencana Aksi Nasional 2020-2022**

Sejak awal tahun 2020, Yayasan Tifa berkoordinasi dengan Open Government Indonesia (OGI) untuk mengintegrasikan Program Review ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI tahun 2020-2022. Setelah melewati sejumlah koordinasi baik dengan OGI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDDT, pada 16 Desember 2020 akhirnya Program review resmi menjadi bagian dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI 2020-2022 melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan Tifa dan Bappenas.

#### **D. Rencana Tindak Lanjut**

Agenda proyek selanjutnya adalah pelaksanaan webinar pada Kamis, 6 Mei 2021. Webinar dengan tajuk **“Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas Program Pembangunan Melalui Pendekatan Evaluasi Program Berbasis Masyarakat”** sekaligus akan menjadi acara peluncuran buku **“Program Review: Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat”**.

Selain penyelenggaraan webinar di atas, rencana selanjutnya adalah persiapan uji coba implementasi Program Review di Indonesia yang akan dimulai dengan pemilihan desa untuk lokasi uji coba implementasi Program Review dilanjutkan dengan serangkaian pelatihan untuk pihak-pihak terkait . Pemilihan desa dan pelaksanaan uji coba implementasi Program Review di Indonesia ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Desa PDDT, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan pemerintah daerah serta aparat desa di lokasi terpilih.